

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Bangka Belitung

2.1.1. Visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan mempunyai visi :

“ MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG“

Pembangunan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan berlandaskan pada dasar-dasar pembangunan yaitu: perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Pembangunan pemberdayaan perempuan tersebut diselenggarakan untuk mencapai visi terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengandung makna bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mampu mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam upaya penanggulangan dari tindak kekerasan guna memperoleh kualitas sumberdaya manusia setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang pemberdayaan perempuan.

2.1.2. Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Bangka Belitung

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung disusun dengan menyatakan secara garis besar apa yang menjadi pembenaran keberadaan organisasi, filosofi yang digunakan untuk menjamin keberadaan organisasi dan sasaran yang akan dicapai. Perumusan misi mengidentifikasi secara umum hal-hal yang ingin dicapai dan memungkinkan penerjemahan hal-hal tersebut sedemikian rupa sehingga operasionalisasi berbagai kegiatan dan hasilnya dapat diukur dan dikendalikan berdasarkan berbagai kriteria yang rasional dan objektif.

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung sebagai berikut :

- Misi 1. : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya mendukung Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Misi 2. : Mendorong terwujudnya kebijakan yang responsive gender dan peduli anak untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan
- Misi 3 : Mengupayakan perlindungan, penghapusan kekerasan serta pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan.
- Misi 4 : Melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Misi 5 : Mendorong terwujudnya keluarga kecil yang sejahtera, sehat, maju dan mandiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keterangan : Dasar Penyusunan Misi

Misi 1 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Misi ke-2) Gubernur dan Wakil Gubernur Priode 2012-2017

Misi 2 : Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (Undang Undang KDRT), Peraturan Pemerintah R.I No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama masyarakat.

Misi 3 : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Misi 4 : Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000.

Misi 5 : BKKBN

2.2. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.2.1. Tujuan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.
2. Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
3. Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana

2.2.2. Sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran dalam mencapai tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) Dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan disegala bidang Pembangunan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
4. Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas

2.2.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 telah menetapkan bahwa **pengarusutamaan gender** merupakan salah satu kebijakan pengarusutamaan pembangunan.

Dalam rangka mencapai sasaran, strategi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak difokuskan pada:

1. Harmonisasi dan integrasi penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
2. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

3. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana.

Arah kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2018 :

1. Kebijakan peningkatan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender.
2. Kebijakan peningkatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
4. Kebijakan peningkatan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Kebijakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana.

Dalam pelaksanaan pembangunan, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi pada tahun 2017 serta memperhatikan pencapaian prioritas nasional bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, maka dalam periode 2012-2017 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas nasional bidang pemberdayaan perempuan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan
Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Harmonisasi dan Intergrasi penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	1. Kebijakan peningkatan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender.	MDG's
				2. Kebijakan penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	
2.	Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kebijakan Peningkatan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	SPM
3.	Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran serta posisi perempuan	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	MDG's dan IKK
4.	Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana	Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana	Kebijakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana	MDG's dan IKK

2.3. Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017, selanjutnya untuk memperjelas capaian tujuan dan sasaran dimaksud maka disusun Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/05.a/BPPKBPA/2013 tentang Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga

Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017.

Tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan
Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2016	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan lembaga Masyarakat (PLM) dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	4,6% (2 dari 43 SKPD)	9,3 % (4 dari 43 SKPD)	14 % (6 dari 43 SKPD)	51,16 % (22 dari 43 SKPD)	55,81% (24 dari 43 SKPD)
			Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	16,3 % (7 dari 43 SKPD)	16,3 % (7 dari 43 SKPD)	18,6 % (8 dari 43 SKPD)	21 % (9 dari 43 SKPD)	23,2 % (10 dari 43 SKPD)
			Persentase Keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	33,33 % (11 dari 33 lembaga)	36,36 % (12 dari 33 lembaga)	39,39 % (13 dari 33 Lembaga)	42,42 % (14 dari 33 lembaga)	45,45 % (15 dari 33 lembaga)
2	Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup dan peran Perempuan di segala bidang pembangunan	Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan, peran serta posisi perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang Mendapatkan Bimbingan manajemen Usaha dari BPPKBPA	0%	2,26 % (7 Klmpok dari 309 Klmpk)	13,59 % (42 Klmpk dari 309 Klmpk)	13,59 % (42 Klmpk dari 309 Klmpk)	14,56 % (45 Klmpk dari 309 Klmpk)
			Persentase perempuan di lembaga Pemerintahan	5,90 %	30,04 %	30,01 %	30,02 %	30,02 %
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	6,24 %	36,87 %	36,9 %	36,95 %	37%

3	Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase data terpilah terkait kesejahteraan anak	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kabupaten/kota yang membentuk kota Layak Anak (KLA)	0%	14,28 % (1 dari 7 kab/ kota)	14,28 % (1 dari 7 kab/ kota)	28,57 % (2 dari 7 kab/ kota)	28,57 % (2 dari 7 kab/ kota)
			Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk.Nasional	10% 7 dari 77 anak)	17,14 % (13 dari 77 Anak)	15,58 % (12 dari 77 Anak)	15,58 % (12 dari 77 Anak)	15,58 % (12 dari 77 Anak)
4	Mengoptimalkan koorbadani dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas	Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat prevalensi peserta KB aktif	81,16 %	81,51 %	81,7 %	81,75 %	81,8 %
			Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	11,15 %	11,42 %	11,25 %	10,95 %	10,69 %

2.4. Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mendukung implementasi RPJMD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan sebanyak 4 (empat) tujuan dengan 4 (empat) sasaran strategis. Untuk mencapai target kinerja sasaran tahun 2016, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Adapun target sasaran tahun 2016 telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016.

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang penetapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lalu Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya

Tujuan Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsi. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2016.

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana
dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran (Rp) (5)
Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan lembaga Masyarakat (PLM) dalam Pembangunan			I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	673.168.800
	Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	51,16% (22 dari 43 SKPD)	1. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	75.852.000
			2. Advokasi dan Pelatihan PPRG Prov.Kep.Babel	63.201.000
	Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	21% (9 dari 43 SKPD) 7 Instansi Vertikal	3. Pengembangan sistem informasi gender dan anak	108.881.000
	Persentase Keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	42,42 %(14 dari 33 lembaga)	4. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi institusi media massa	131.620.000
Meningkatnya Kualitas Hidup dan peran Perempuan di segala bidang pembangunan			II. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1.373.363.400
	Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan serta posisi perempuan	100 %	1. Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	320.201.000
			2. Operasional Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung	516.437.000
			3. Pameran Hasil Karya Perempuan	207.657.000

	Persentase kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	13,59%(42 Kelompok dari 309 kel)	4. Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif	126.390.000
	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	30,20%	5. Advokasi bidang Partisipasi Politik Perempuan	74.570.000
			6. Pendidikan dan Pelatihan Politik Perempuan	76.242.000.
			7. KIE Partisipasi Politik Perempuan	135.982.300.
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang			III. Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.144.057.800
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 %	1. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	131.858.000
			2. Operasional Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	354.670.000
	Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	100 %	3. Sosialisasi UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak	252.595.000
			4. Bimbingan teknis Pelaporan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	72.654.000
	Persentase data terpilah terkait kesejahteraan anak	100 %	5. Penyusunan Profil Kesejahteraan Perlindungan Anak	59.830.000

	Persentase kabupaten/kota yang membentuk kota layak anak (KLA)	28,57 % (2 dari 7 kab/kota)	6. Pembinaan Partisipasi Hak Anak	230.038.000
Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas			IV. Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	759.945.000
	Persentase anak yang mengikuti forum anak Tk.Nasional	15,58 % (12 dari 77 anak)	1. Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS)	412.613.000
	Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	100 %	2. Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)	609.261.000
	Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif	81,75 %	Sosialisasi Reproduksi Sehat Bagi Remaja	132.930.000
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	10,95 %		